



Identifikasi dan Manajemen Risiko untuk Mereduksi Kerentanan Pada Masyarakat

Mukhammad Fatkhullah^{1,*}, Muhammad Alhada Fuadilah Habib², Kanita Khoirun Nisa³

¹ Comm, Rel & CSR, PT Kilang Pertamina Internasional Unit Dumai
Jalan Teluk Binjai, Kode Pos 28815, Dumai, Indonesia

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah
Jalan Mayor Sujadi No.46, Kode Pos 66221, Tulungagung, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jalan Laksda Adisucipto, Kode Pos 55281, Yogyakarta, Indonesia

Email: ¹m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id, ²habibhada@gmail.com, ^{3,*}kanita.nisa@uin-suka.ac.id

Email Penulis Korespondensi: m.fatkhullah@mail.ugm.ac.id

Submitted: 21/04/2022; Accepted: 29/05/2022; Published: 30/05/2022

Abstrak—Kerentanan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. Kegagalan dalam melakukan identifikasi dan mengelola kerentanan membuat program atau kebijakan yang dirancang baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga swadaya masyarakat (non-government organization/NGO) berjalan tidak sesuai dengan harapan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait definisi, sumber dan bentuk, metode identifikasi, serta intervensi dalam mengelola risiko untuk meminimalisir kerentanan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode sistematika literatur review dengan kriteria inklusi berdasarkan kata kunci: vulnerability, social risk, dan social protection. Adapun kriteria eksklusi pada penelitian ini meliputi: topik yang tidak berhubungan dengan permasalahan penelitian; rentang publikasi artikel yang lebih dari 8 tahun; serta artikel dengan metode, temuan, dan pembahasan yang kurang signifikan. Kerentanan merupakan kondisi yang membuat masyarakat mudah terdampak oleh berbagai ancaman. Ancaman tersebut terdiri dari risiko eksternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi maupun risiko internal seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Baik risiko eksternal maupun internal memiliki keterkaitan yang erat. Identifikasi dilakukan untuk memetakan dan melakukan kategorisasi tidak hanya berdasarkan penyebab dan bentuk kerentanan, namun juga pada besarnya dampak, banyaknya korban dan kerugian yang mungkin ditimbulkan. Data-data ini penting untuk menentukan skala prioritas dalam menentukan intervensi yang harus dilakukan. Intervensi preventif diperlukan pada level risiko rendah, promotif pada level risiko sedang, dan protektif pada level risiko tinggi. Apabila pencegahan, dukungan dan perlindungan tidak lagi dapat dilakukan, diperlukan intervensi yang bersifat transformatif untuk menjauhkan masyarakat dari krisis.

Kata Kunci: Kerentanan; Identifikasi Risiko; Manajemen Risiko; Strategi Intervensi; Sistematika Literatur Review

Abstract—Vulnerability is an important aspect of national development. Failure to identify and manage vulnerabilities makes programs or policies designed by the government, companies, or non-governmental organizations run not as expected. This study aims to provide an understanding of definitions, sources and forms, identification methods, and interventions in managing risk to minimize vulnerability in the community. This study uses a systematic literature review method with inclusion criteria based on keywords: vulnerability, social risk, and social protection. The inclusion and exclusion criteria include: type of publication, year, accessibility, relevance, methodology and publication contribution. Vulnerability is a condition that makes a community easily affected by various threats. These threats consist of external risks such as the natural environment, social and demographic composition as well as internal risks such as economic conditions, physical and mental health. Both external and internal risks are closely related. Identification is carried out to map and categorize not only based on the causes and forms of vulnerability, but also on the magnitude of the impact, the number of victims and the possible losses. These data are important to determine the priority scale in determining the intervention that must be carried out. Preventive interventions are needed at low risk levels, promotive at moderate risk levels, and protective at high risk levels. If prevention, support and protection are no longer possible, transformative interventions are needed to keep communities away from crises.

Keywords: Vulnerability; Risk Identification; Risk Management; Strategic Intervention; Systematic Literature Review

1. PENDAHULUAN

Kerentanan merupakan salah satu aspek atau dimensi terpenting dalam pengembangan masyarakat. Kelalaian dalam tahap identifikasi dan kegagalan dalam mengelola kerentanan dapat membuat program atau kebijakan yang dirancang baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun lembaga swadaya masyarakat (*non-government organization/NGO*) berjalan tidak sesuai dengan harapan.

Tabel 1. Dampak Bencana Alam dalam Lima Dekade Terakhir (Ritchie & Roser, 2019)

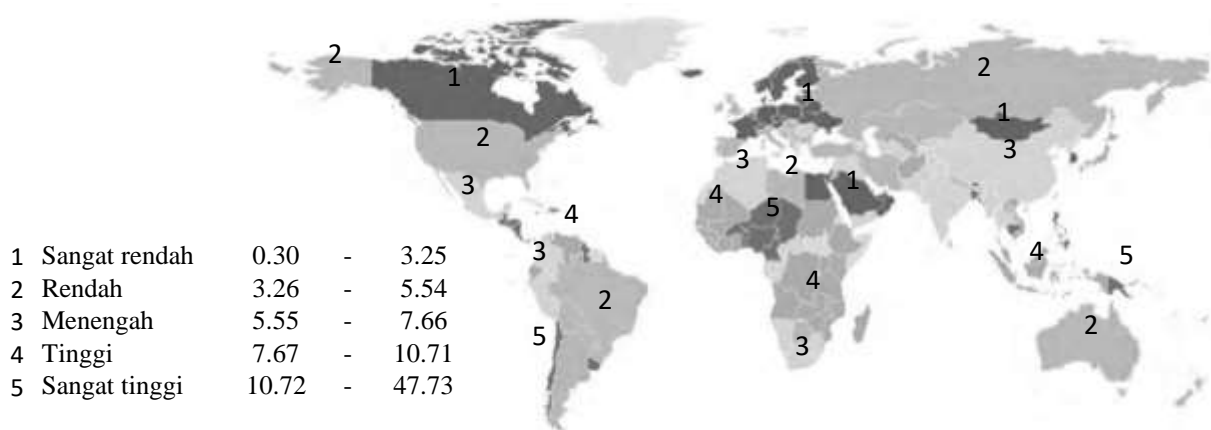
Dampak	Satuan	1970	1980	1990	2000	2010	Jumlah
Kematian	Orang	98.836	74.994	43.359	78.138	45.260	340.587
Luka-luka	Orang	55.200	31.308	146.879	327.989	91.803	653.179
Terlantar	Jutaan Orang	2,25	2,31	7,62	2,81	1,15	16,14
Terpapar	Jutaan Orang	52,97	121,62	193,55	224,28	175,32	767,74
Penurunan Ekonomi	Nilai GDP	0,09%	0,13%	0,24%	0,19%	0,22%	0,87%

Selama lima dekade terakhir, 767,74 juta orang dari berbagai belahan dunia terdampak oleh bencana alam. Tidak hanya merenggut 340 ribu jiwa, bencana juga telah membuat 16,14 juta orang kehilangan tempat tinggal.



Bencana ini termasuk kekeringan, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, kebakaran hutan, suhu ekstrim. Berdasarkan tabel 1, bencana alam juga menyebabkan penurunan nilai *Gross Domestic Product* (GDP) tiap negara sebesar 0,17%, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran, kemiskinan dan melemahkan upaya jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Angka tersebut belum termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi baru-baru ini terhadap ekonomi global yang mempengaruhi rata-rata GDP sebesar 3% pada negara maju dan 4% pada negara berkembang (Mou, 2020). Sayangnya, kerusakan yang diakibatkan oleh bencana sosial-kemanusiaan yang hingga saat ini belum dapat diukur secara akurat. Berbagai bencana yang datang tidak hanya berdampak pada jumlah manusia, namun segala apa yang telah di bangun.

Beberapa negara memiliki tingkat kerentanan yang lebih besar dibanding negara lainnya (Zorn, 2018, p. 59). Di Indonesia, tingginya kerentanan terhadap bencana alam, sosial dan ekonomi menjadi berkali-kali lipat. Ini disebabkan karena bentuk negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik (Syafitri, Bahtiar, & Didik, 2018, p. 140). Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat rawan terpapar bencana seperti gempa, gunung berapi, serta bencana alam lain seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan laut. Tidak hanya itu, keberagaman suku, agama, etnis dan budaya juga memberikan sumbangan yang penting bagi tingkat kerentanan di Indonesia. Kerentanan tersebut didasarkan atas potensi bencana sosial-kemanusiaan yang mungkin terjadi karena perbedaan pendapat, melemahnya toleransi, hingga komunikasi yang buruk antara kelompok masyarakat (Ridwan, 2015, pp. 263-266).



Gambar 1. Peta Dunia Berdasarkan Tingkat Risiko (Aleksandrova, et al., 2021, p. 69)

Berdasarkan gambar 1, Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kerentanan yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain di dunia. Pengukuran tersebut didasarkan atas berbagai indikator seperti kemampuan dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Termasuk didalamnya efek bahaya alam, dampak negative perubahan iklim, serta proses perubahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Agar upaya pengembangan masyarakat tidak menjadi rangkaian agenda pemborosan, identifikasi sumber kerentanan menjadi penting untuk menunjang tujuan pembangunan berkelanjutan. Identifikasi kerentanan dilakukan untuk memetakan kebutuhan terpenting dan merancang strategi manajemen kerentanan pada masyarakat. Termasuk didalamnya merencanakan jenis intervensi yang sesuai untuk mengeliminasi kerentanan, hingga menentukan skala prioritas intervensi yang harus dilakukan pada suatu kelompok masyarakat agar mereka dapat bertahan dalam berbagai tekanan.

Isu strategis yang harus diperhatikan dalam melakukan identifikasi dan memetakan kebutuhan masyarakat dalam upaya manajemen kerentanan adalah bahwasanya masyarakat selalu bergerak dinamis. Beberapa program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (Nisa & Habib, 2020), serta NGO mungkin berhasil mengurangi kerentanan atau mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Akan tetapi, beberapa justru menciptakan kerentanan atau masalah baru. Sebagai contoh, kegagalan dalam mengupayakan pembaruan data pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyebabkan penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga, program yang ada tidak memberikan dampak apa pun bagi penerima manfaat. Kegagalan yang sama juga terjadi pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyebabkan kecemburuan sosial antar masyarakat (Juhad, 2021). Dalam konteks ini, kurangnya informasi dan pendataan atas perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat menjadi bumerang bagi pemangku kepentingan program. Oleh karena itu, pencatatan, identifikasi, dan pemetaan kerentanan beserta kebutuhan masyarakat hendaknya dilakukan secara berkala.

Dengan begitu, kebijakan atau program yang diterapkan baik di tingkat lokal maupun nasional dapat lebih berdampak khususnya dalam mengurangi risiko kerentanan pada masyarakat. Harapannya, program atau kebijakan yang ada dapat memberikan *social security* kepada kelompok rentan, sehingga mereka dapat berfokus untuk meningkatkan kualitas hidupnya tanpa adanya kekhawatiran (*insecurity*).



Meskipun kerentanan akan selalu ada dalam berbagai bentuk dan dimensinya, namun usaha-usaha untuk meminimalisir tetap mungkin untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait definisi, dimensi dan bentuk, metode identifikasi risiko, serta intervensi yang mungkin dilakukan untuk mengeliminasi kerentanan pada masyarakat. Kajian terkait topik ini memang sudah banyak ditulis oleh akademisi maupun praktisi seperti Aromataris & Pearson (2014), Zorn (2018), Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam (2019), serta Aleksandrova, et al. (2021). Akan tetapi, penelitian terdahulu melihat kerentanan dalam batasan tertentu. Selain itu, penelitian terdahulu belum melihat dampak ekologis yang bersifat global seperti munculnya pandemi COVID-19 sebagai suatu yang layak untuk diperhitungkan. Sehingga hasil dari kajian ini menawarkan pemahaman yang lebih luas terkait identifikasi kerentanan dan strategi intervensi berdasarkan sumber kerentanan (eksternal/internal), prevalensi atau tinggi rendahnya ancaman, serta bentuk dan sifat intervensi yang digunakan untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan *assessment* dan perencanaan program atau kebijakan guna mendukung upaya pengembangan masyarakat yang dilakukan baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun NGO dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, yaitu mulai Bulan Januari hingga Maret 2022. Adapun metode yang digunakan adalah sistematika literatur review, di mana analisisnya berdasar pada hasil publikasi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian (Aromataris & Pearson, 2014). Adapun tahapannya terdiri dari perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*conducting*) dan pelaporan (*reporting*). Pada tahap perencanaan, penelitian ini dimulai dengan melakukan penentuan topik dan sasaran group analisis. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal nasional dan internasional. Pada tahap pelaksanaan, penelitian dilakukan dengan menentukan kata kunci yaitu: *vulnerability*, *social risk*, dan *social protection*. Pencarian data dilakukan dengan menelusuri direktori jurnal ilmiah yang dapat diakses melalui Perpustakaan Nasional, Portal Garuda, Jurnal LIPI, DOAJ Scencedirect dan ProQuest. Adapun kriteria seleksi pada sistematika literatur review ini dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi.

Tabel 2. Kriteria Seleksi Temuan Data

Inklusi	Eksklusi	Ekstraksi
1. Bentuk publikasi	1. Relevansi substansi	1. Definisi
2. Tahun publikasi	2. Metodologi	2. Bentuk
3. Aksesibilitas	3. Hasil yang elaboratif	3. Strategi intervensi

Kriteria inklusi meliputi kesesuaian temuan dengan bentuk publikasi ilmiah baik berupa buku, laporan penelitian maupun jurnal atau artikel ilmiah. Tahun publikasi artikel yang dipilih memiliki minimal rentang 8 tahun terakhir. Artikel yang dipilih tentunya harus dapat diakses secara penuh (*full text*) agar hasil dari penelitian ini baik secara substansial maupun metodologis dapat diuji dan dievaluasi untuk kemudian dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Hasil temuan akan dieksklusikan apabila substansi dinilai kurang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian, tidak memiliki metode, temuan, dan pembahasan yang terukur, serta hasil dan pembahasan yang kurang memiliki kontribusi dalam mengembangkan konsep kerentanan dan manajemen risiko pada masyarakat.

Tabel 3. Defnisi, Bentuk dan Strategi untuk Mereduksi Kerentanan pada Masyarakat

Penulis	Tahun	Bentuk & Cakupan	Sumber	Kata Kunci
Riyanto	(2015)	Penelitian lapangan (nasional)	LIPI	Social protection
Aleksandrova, et al.	(2021)	Penelitian lapangan (internasional)	DOAJ	Social risk
FAO and RCRC	(2019)	Buku (internasional)	Scencedirect	vulnerability
Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam	(2019)	Literatur review (internasional)	ProQuest	vulnerability
Zorn	(2018)	Literatur review (internasional)	Scencedirect	Social risk
Poernomo	(2017)	Penelitian lapangan (nasional)	Portal Garuda	Social protection
Shiwaku, Sakurai, & Shaw	(2016)	Penelitian lapangan (internasional)	Scencedirect	Social risk
Global Humanitarian Assistance	(2016)	Buku (internasional)	DOAJ	Vulnerability
Aromataris & Pearson	(2014)	Literatur review (internasional)	ProQuest	Social protection
Fields	(2014)	Penelitian lapangan (internasional)	ProQuest	Vulnerability

Dari tiga puluh kepustakaan yang berhasil di temukan, sepuluh di antaranya memiliki rentang publikasi lebih dari 8 tahun terakhir. Adapun lima lainnya dinilai kurang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, lima lainnya tidak memuat kajian yang komprehensif terkait pertanyaan penelitian. Ekstraksi data dilakukan dengan cara kategorisasi temuan berdasarkan aspek definitif, bentuk-bentuk, dan strategi untuk meminimalisir risiko atau kerentanan pada masyarakat. Sebagai pelengkap, kajian pustaka tambahan dilakukan dengan melakukan pencarian



pada jurnal nasional dan internasional, serta laporan dan dokumen resmi yang terindeks dan bisa diakses melalui Google Scholar. Kajian ini diperlukan untuk memperluas wawasan konseptual, memperdalam analisis, serta menyelaraskan hasil temuan dengan kepustakaan yang relevan. Sedangkan untuk tahap pelaporan, data yang telah disaring berdasarkan pedoman tersebut kemudian dikembangkan menjadi deskripsi dan narasi proses identifikasi risiko, serta alur manajemen risiko pada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, kerentanan masyarakat dapat bersumber dari lingkungan, ekonomi dan kesehatan. Faktor lingkungan terdiri dari kondisi alam yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, geologis, serta potensi wabah di suatu daerah; sosial yang erat kaitannya dengan potensi konflik, kekerasan dan diskriminasi; serta kondisi demografi termasuk di dalamnya komposisi populasi, rasio jenis kelamin, serta rasio usia dalam suatu daerah. Adapun faktor ekonomi sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia, serta regulasi pemerintah setempat yang memiliki kaitan erat dengan konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan, fatalitas dalam bekerja, hingga pengelolaan sumberdaya alam, kelangkaan, hingga ketersediaan lapangan kerja. Faktor ekonomi memiliki hubungan langsung dengan kemiskinan masyarakat. Regulasi yang kurang tepat dalam mengelola sumberdaya alam dan manusia dapat berujung pada terpuruknya kondisi ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan angka kemiskinan di suatu daerah. Sementara itu, faktor kesehatan terdiri dari kesehatan fisik dan mental atau psikologis. Kesehatan masyarakat di suatu daerah sangat ditentukan oleh mudah/tidaknya akses terhadap infrastruktur dan pelayanan kesehatan, serta kondisi lingkungan alam dan sosial suatu masyarakat. Pada pengertian ini, tiga faktor utama yaitu lingkungan, ekonomi dan kesehatan sebenarnya saling terkait sebagaimana dipaparkan pada table 4.

Tabel 4. Defnisi, Bentuk dan Strategi untuk Mereduksi Kerentanan pada Masyarakat

Literatur	Definisi	Bentuk	Strategi
Riyanto (2015)	Kondisi masyarakat yang kurang menguntungkan	Rasio kemiskinan, jenis kelamin, disabilitas, usia.	Evakuasi bencana alam
Aleksandrova, et al. (2021)	Kondisi yang dipengaruhi oleh lingkungan	Tingkat konsumsi, risiko kesehatan	Bantuan afirmatif untuk slum area
FAO and Red Cross Red Crescent Climate Centre (2019)	Kondisi yang mengancam keberlanjutan hidup keluar dari harapan ideal	Bencana geologi, gempa, gunung berapi, perubahan iklim, kesehatan fisik dan mental	Migrasi untuk risiko lingkungan, perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, fokus pada penyandang masalah sosial kemiskinan
Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam (2019)	Kondisi yang dapat menyebabkan suatu sistem sosial mengalami krisis	Krisis skala makro dan mikro	Asuransi sosial, jaring keselamatan sosial, bantuan tertarget, layanan public, inklusi sosial, kebijakan yang aktif, kebijakan tepat sasaran
Zorn (2018)	Risiko yang dihadapi oleh suatu sistem sehingga mengalami gangguan	Kemiskinan, bencana alam dan geografis	Pendidikan, pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi
Poernomo (2017)	Kondisi yang menyebabkan masyarakat mengalami masa kritis	Kesehatan, kondisi ekonomi, bencana alam, kekerasan, wabah, kecelakaan, pengangguran	Kebijakan mitigasi subsidi menyeluruh, fokus pada kluster paling rentan
Shiwaku, Sakurai, & Shaw (2016)	Kondisi yang menurunkan produksi dan konsumsi masyarakat	Perubahan iklim, bencana alam	Peningkatan infrastruktur, produktifitas barang, pendidikan
Global Humanitarian Assistance (2016)	Kondisi yang menyebabkan kehilangan alat produksi, sumber pendapatan	Konflik dan kekerasan, bencana alam	Pembaruan data dan edukasi risiko pada masyarakat
Aromataris & Pearson (2014)	Kondisi yang menyebabkan Negara berkembang menderita kemiskinan.	Kesehatan mental, pendidikan, ketersediaan air bersih, pengangguran	Peningkatan kualitas kesehatan pada kelompok rentan
Fields (2014)	Kondisi penyebab pergerakan positif individu/kelompok secara vertikal sulit	Rendahnya konsumsi, kesempatan kerja, sumber daya manusia	Menambah lapangan kerja, keterampilan, peningkatan upah minimum

Melalui gambar 2, dapat diketahui bahwa faktor ekonomi memiliki hubungan langsung terhadap kemiskinan masyarakat. Akan tetapi, faktor lingkungan dan kesehatan juga memiliki kontribusi yang penting terhadap

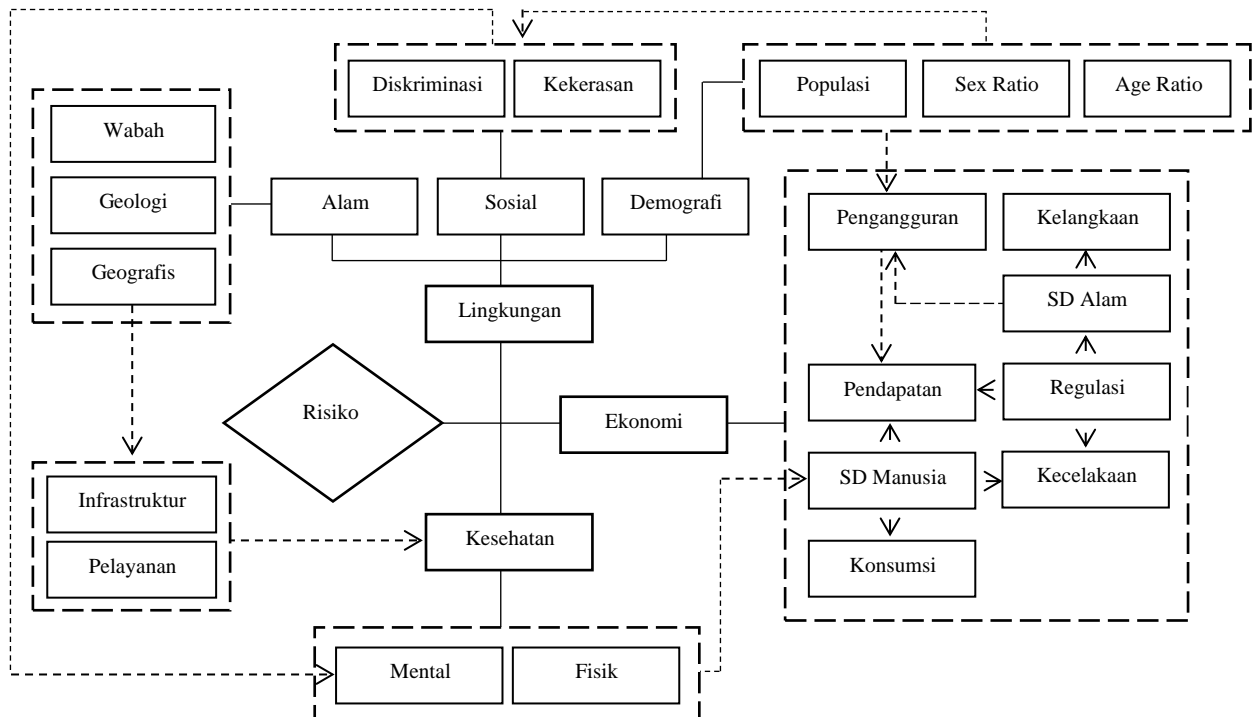


kemiskinan. Pada pengertian ini, baik lingkungan, ekonomi maupun kesehatan memiliki keterkaitan yang erat. Hubungan antara faktor lingkungan dan ekonomi dapat dilihat pada profil demografi terhadap tingkat pengangguran. Ledakan penduduk meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sayangnya, hal ini sering kali tidak diikuti dengan kapasitas lapangan kerja. Sementara itu, tuntutan perusahaan terkait jenis kelamin dan usia terkadang juga turut memberatkan. Akibatnya, pengangguran meningkat. Hal ini dapat diperparah dengan tingginya angka ketergantungan. Tenaga kerja yang menganggur, serta wanita dan lansia yang masih harus ditanggung menjadi masalah ekonomi yang cukup klasik, bahkan hingga kini masih sulit dipecahkan khususnya pada negara berkembang.

Hubungan antara faktor kesehatan dan ekonomi dapat dilihat dari kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia menjadi faktor yang determinan dalam ekonomi masyarakat. Tingginya kesadaran akan kesehatan, ketercukupan gizi, serta sehatnya jasmani dan rohani masyarakat dapat menentukan kualitas dan produktivitas dalam bekerja. Sebaliknya, berbagai masalah kesehatan baik yang berasal dari lingkungan maupun karena diturunkan dapat menjadi batu sandungan yang besar bagi masyarakat. Contoh nyata dari hubungan ini adalah pasar lapangan kerja yang menggunakan kondisi kesehatan pelamar sebagai persyaratan dalam proses rekrutmen. Pada pengertian ini, masyarakat yang terpapar masalah kesehatan dan memiliki pengetahuan rendah terkait perilaku hidup sehat, yang mana biasanya berasal dari kalangan ekonomi rendah tentu memiliki kesempatan yang lebih sedikit dari mereka yang menerapkan pola hidup sehat dengan makanan dan gizi yang tercukupi. Aspek lain dalam konteks hubungan antara kesehatan dan kualitas sumberdaya manusia adalah pada beberapa risiko kesehatan yang bersifat kronis, yang mungkin dihadapi oleh seorang individu serta bagaimana individu tersebut dapat pulih dan terhindar dari masalah yang sama di masa mendatang.

Sementara itu, hubungan antara lingkungan dengan kesehatan dapat dilihat dari pengaruh kondisi alam serta kondisi sosial. Kondisi alam mencakup kondisi geologi, geografi, serta potensi wabah dan bencana yang mungkin terjadi dalam suatu lokasi. Semakin tinggi risiko alam dalam suatu lokasi, maka kesehatan masyarakat pun juga semakin terancam. Di sisi lain, kondisi sosial juga memiliki andil yang penting. Lingkungan dengan risiko konflik dan diskriminasi yang tinggi memungkinkan masyarakat tertekan tidak hanya secara fisik, namun juga mental.

3.1 Definisi Kerentanan dan Dimensi Risiko Pada Masyarakat



Gambar 2. Dimensi Risiko dan Kaitannya dengan Kemiskinan

Beberapa penelitian menyatakan kerentanan memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Meskipun demikian, kemiskinan tidak bisa dijadikan penentu utama dalam menentukan tingkat kerentanan suatu masyarakat. Tinggi atau rendahnya kerentanan dalam masyarakat didasarkan atas kemampuan kelompok masyarakat untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi dari ancaman dalam bentuk apa pun. Dengan begitu, suatu masyarakat dikatakan dalam kondisi yang rentan apabila mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari ancaman yang datang. Ancaman yang datang bersumber dari jenis dan tingkat risiko yang dimiliki oleh masyarakat. Tiap masyarakat tentunya memiliki jenis dan tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, identifikasi risiko menjadi penting sebagai dasar untuk menentukan strategi dan kebijakan terbaik dalam mencegah, menangani, serta meminimalisir dampak. Sementara itu, kemampuan untuk bertahan, bangkit dan beradaptasi didasarkan atas pengetahuan, infrastruktur, maupun aset lain dalam berbagai bentuk.



Berdasarkan gambar 2, risiko yang dihadapi oleh masyarakat dapat dikelompokkan dalam menjadi dua, yaitu risiko eksternal dan internal. Risiko eksternal merupakan segala bentuk risiko yang bersumber dari eksternalitas individu. Artinya, risiko eksternal berkaitan erat dengan lingkungan di mana individu itu tinggal. Risiko ini dapat bersumber dari aspek alamiah seperti kondisi geografis, cuaca dan iklim, serta wabah dan penyakit yang memiliki siklus tertentu. Selain kondisi alam, faktor risiko juga dapat ditemukan pada kondisi sosial. Keberagaman budaya, identitas, dan kondisi politik suatu masyarakat juga dapat menjadi sumber risiko terjadinya kekerasan dan diskriminasi. Faktor risiko juga bisa ditemukan pada komposisi atau karakteristik demografi masyarakat itu sendiri. Misalnya saja ledakan populasi, ketimpangan antara penduduk pria dan wanita, serta penduduk usia produktif dan tidak produktif.

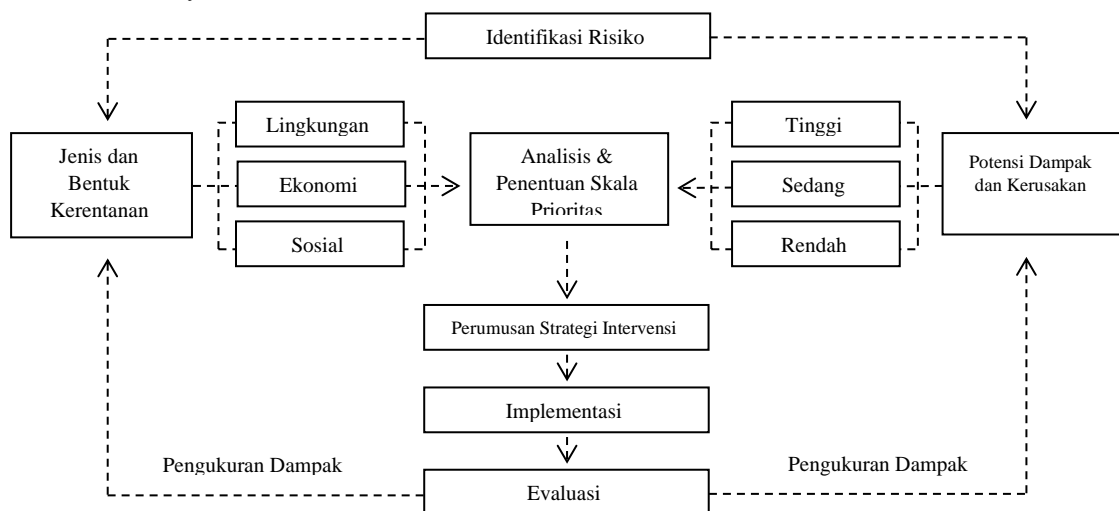
Sementara itu, risiko internal merupakan segala bentuk risiko yang bersumber dari dalam diri individu. Artinya, risiko internal berkaitan erat dengan kondisi kekinian yang terjadi dan dialami individu. Risiko ini terwujud dalam bentuk kondisi ekonomi, kondisi fisik dan kondisi siks. Meskipun demikian, faktor ekonomi dan kesehatan baik fisik maupun mental tidak sepenuhnya dikategorikan dalam risiko internal. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur dan kemudahan akses yang ada pada suatu masyarakat, yang mana termasuk dalam eksternalitas individu. Di sisi lain, kesehatan juga memiliki kaitan erat dengan lingkungan tempat tinggal masyarakat, kondisi geografis dan cuaca yang ada pada suatu daerah.

Sehingga, baik risiko internal maupun risiko eksternal memiliki hubungan timbal balik dalam menentukan tinggi atau rendahnya kerentanan pada masyarakat. Dimensi internal risiko dapat diminimalisir dengan melakukan edukasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui rangkaian pelatihan ataupun peningkatan layanan kesehatan. Sementara dimensi eksternal risiko dapat diminimalisir dengan menerapkan kebijakan yang baik, melakukan perbaikan pada kualitas lingkungan hidup, serta membangun infrastruktur yang mampu mengeliminasi berbagai bentuk risiko maupun meminimalisir dampak ancaman yang mungkin terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan kondisi suatu masyarakat yang membuat mereka mudah terdampak oleh berbagai ancaman. Ancaman tersebut mungkin terjadi karena adanya risiko yang bersumber dari faktor eksternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi maupun internal seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Baik faktor eksternal maupun internal memiliki keterkaitan yang erat, sehingga upaya yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi atau meminimalisir kerentanan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya yang dimiliki dan atau mengurangi risiko ancaman dengan melakukan perubahan dalam tataran struktural maupun proses.

3.2 Identifikasi Bentuk dan Tingkat Risiko pada Masyarakat

Kerentanan memiliki dimensi yang kompleks, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki kerentanan yang berbeda. Namun, kerentanan pada masyarakat dapat dimiminalisir melalui pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan secara berbeda pada masyarakat dengan asumsi bahwa dimensi, bentuk dan penyebab kerentanan tersebut juga berbeda. Untuk itu, mengidentifikasi jenis risiko merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk meminimalisir kerentanan dalam masyarakat.



Gambar 3. Kerangka Kerja Identifikasi dan Analisis Risiko pada Masyarakat

Sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 3, identifikasi tidak hanya mencakup jenis dan bentuk kerentanan yang ada pada masyarakat, namun juga tingkat dan potensi ancaman dan keparahan dampak yang mungkin ditimbulkan. Data-data ini kemudian digunakan untuk menentukan skala prioritas dalam menentukan intervensi yang harus dilakukan terhadap suatu kondisi. Bentuk intervensi dapat bersifat preventif pada jenis risiko dengan kategori rendah, promotif pada jenis risiko dengan kategori sedang, protektif pada jenis risiko dengan kategori tinggi, serta transformatif pada jenis risiko dengan kategori sangat tinggi.



Jika dalam proses identifikasi terdapat banyak risiko, maka strategi manajemen risiko yang tepat menjadi sangat esensial. Pada konteks ini identifikasi tingkat risiko berfungsi sebagai landasan dalam menentukan urgensi dan prioritas intervensi yang harus dilakukan. Identifikasi dilakukan untuk memetakan dan melakukan kategorisasi tidak hanya berdasarkan penyebab dan bentuk kerentanan, namun juga pada prevalensi tingkat keparahan atau urgensi dari kerentanan yang ada pada masyarakat (Global Humanitarian Assistance, 2016).

Kerentanan dengan kategori level tinggi merujuk pada kondisi yang dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat dalam waktu dekat. Selain waktu, aspek lain yang turut dipertimbangkan dalam mengukur tingkat kerentanan adalah cakupan dampak serta potensi kerugian yang mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan banyaknya masyarakat yang mungkin terdampak serta kontribusinya terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh individu, komunitas maupun pemerintah, skala prioritas suatu program atau kebijakan dapat dirumuskan. Dengan cara ini, program atau kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang signifikan.

3.2 Intervensi untuk Mereduksi Risiko pada Masyarakat

Pencegahan merupakan cara paling mudah dalam menangani masyarakat rentan khususnya pada masyarakat dengan jenis kerentanan yang dikategorikan rendah. Intervensi preventif merupakan intervensi yang dilakukan untuk mencegah ancaman yang dapat merugikan masyarakat. Selain mudah, upaya preventif juga dinilai cukup ekonomis. Berdasarkan tabel 5, intervensi yang dapat diterapkan untuk mencegah risiko lingkungan alam pada masyarakat adalah: 1) Melakukan edukasi terkait risiko yang ada pada masyarakat. Ketika masyarakat memahami risiko apa saja yang ada di lingkungan sekitar, maka mereka akan cenderung berhati-hati dalam bertindak; 2) Melakukan edukasi terkait jenis dan bentuk risiko saja tidak cukup. Masyarakat harus memiliki keterampilan untuk bertahan hidup dalam kondisi tertentu, misalnya saja ketika terjadi gempa, tsunami, bahkan tanah longsor. Pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni akan membuat masyarakat lebih dapat bertahan hidup di masa krisis (Shiwaku, Sakurai, & Shaw, 2016); 3) Membangun infrastruktur pendukung seperti tanggul atau bendungan yang dapat mencegah bencana banjir atau bencana lainnya; 4) Melakukan edukasi terkait perilaku hidup bersih, sehat dan berkelanjutan untuk menghindarkan masyarakat dari penyakit yang dapat mewabah atau bahaya lain yang disebabkan karena rusaknya lingkungan dan pemanasan global.

Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi preventif dapat diwujudkan dengan: 1) Melakukan edukasi tentang toleransi. Masyarakat dengan toleransi yang tinggi memungkinkan untuk terhindari dari diskriminasi dan kekerasan seberapa banyak pun perbedaan pendapat yang ada di antara mereka (Asiyah, Kurniawan, & Topano, 2021); 2) Melakukan edukasi anti kekerasan. Proses ini penting dilakukan agar masyarakat dapat dan terbiasa untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan; 3) Pembangunan infrastruktur atau layanan yang mendorong masyarakat untuk lebih mendukung keberagaman dan mencintai perdamaian. Infrastruktur ini dapat berbentuk fasilitas umum yang dapat digunakan bersama misalnya ruang pertemuan, perpustakaan yang memuat banyak referensi kultural, serta ruang terbuka yang dipenuhi slogan-slogan yang mempromosikan perdamaian (Sumampouw, 2019); 4) Pengendalian penduduk. Di berbagai negara berkembang, komposisi demografi menjadi akar masalah kependudukan karena memiliki kaitan erat dengan pengangguran, diskriminasi dan tingginya beban yang harus ditanggung angkatan kerja. Tingginya dependensi rasio juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Bidisha, Abdullah, Siddiqua, & Islam, 2019). Oleh karena itu, program Keluarga Berencana yang mengusung slogan “dua anak cukup” menjadi salah satu contoh intervensi preventif untuk mencegah ledakan penduduk yang secara umum dapat menjadi penyebab masalah sosial lainnya.

Sementara itu untuk aspek ekonomi, intervensi preventif dapat dilakukan dengan: 1) Melakukan perencanaan industri yang terintegrasi, sehingga dapat menekan biaya produksi dan menyerap lebih banyak tenaga kerja; 2) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar dapat memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, maupun menciptakan wirausahawan untuk memenuhi permintaan lapangan kerja; 3) Melakukan sosialisasi dan penerapan prosedur keselamatan kerja untuk mencegah kecelakaan kerja. Hal ini penting dilakukan pada sektor industri yang memang memiliki risiko yang tinggi. Apalagi, jika pekerja yang dimaksudkan merupakan tulang punggung keluarga yang menyumbang sebagian besar dari pendapatan keluarga; 4) Menyediakan kesempatan atau akses yang sama pada lapangan kerja; 5) Kebijakan perpajakan terkait harga barang primer dan tersier. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah perilaku konsumtif (Olivola & Sussman, 2015), khususnya pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah dalam mengakses barang-barang tersier dan mengesampingkan kebutuhan primer atau investasi produktif yang seharusnya justru lebih menguntungkan.

Sedangkan untuk aspek kesehatan, intervensi preventif dapat berbentuk: 1) Pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil. Fokus dari strategi ini adalah untuk mengupayakan pemerataan dalam hal akses terhadap infrastruktur dan layanan kesehatan; 2) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan kesehatan khususnya di daerah. Masih banyak instalasi kesehatan yang beroperasi dengan fasilitas dan kualitas pelayanan yang seadanya (Yandrizal & Suryani, 2015). Bahkan di beberapa daerah, fasilitas yang ada tidak dapat benar-benar digunakan dan hanya difungsikan sebagai persyaratan administratif suatu instalasi kesehatan agar terus berdiri dan beroperasi; 3) Pembangunan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses menuju instalasi dan pelayanan kesehatan terdekat. Sering kali, tantangan terbesar dalam mendapatkan pertolongan kesehatan adalah pada sulitnya akses untuk mendapatkannya. Meskipun ada banyak instalasi yang tersedia, namun masyarakat masih dalam kondisi terancam apabila sebagian dari mereka masih merasa kesulitan untuk mengaksesnya. Hal tersebut tidak hanya berlaku



dalam konteks fisik, namun juga terkait prosedur administratif yang mungkin akan memperlambat pelayanan diberikan. Khususnya, pada beberapa pasien yang berada dalam kondisi kritis.

Jika ancaman tidak dapat dihindarkan, maka intervensi promotif mungkin diperlukan. Intervensi promotif merupakan intervensi yang dilakukan untuk mendukung daya tahan masyarakat dalam menghadapi kondisi krisis. Intervensi ini juga dapat digunakan untuk mempercepat pemulihan akibat kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu kondisi krisis, misalnya bencana alam, pandemi atau bahkan kerusakan masyarakat. Intervensi ini biasanya dilakukan sesaat setelah bencana atau ancaman benar-benar menjadi kenyataan, sehingga efektivitas intervensi hanya berlaku pada tingkat risiko dengan kategori sedang atau saat terjadi krisis. Intervensi ini tidak direkomendasikan untuk diberlakukan dalam jangka panjang atau secara terus-menerus karena dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan.

Intervensi promotif yang dapat diterapkan untuk mendukung masyarakat dari ancaman yang disebabkan oleh risiko lingkungan alam adalah: 1) Memberikan bantuan berupa uang tunai untuk mempertahankan kemampuan konsumsi masyarakat terdampak. Upaya ini juga bermanfaat agar kegiatan ekonomi berjalan sebagaimana mestinya; 2) Selain uang tunai, bantuan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok juga dapat menjadi prioritas agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup, khususnya dalam kondisi di mana kegiatan ekonomi daerah terdampak benar-benar mengalami kelumpuhan; 3) Pendirian posko pengungsian untuk menampung dan mengkoordinir masyarakat terdampak, melakukan karantina, serta banyak tujuan lain agar kegiatan pemulihan dapat berjalan dengan optimal; 4) Mengerahkan tenaga kesehatan dan suplai obat-obatan yang dibutuhkan untuk mendukung proses pemulihan.

Tabel 5. Strategi Intervensi dalam Konteks Krisis
[Diadaptasi dari Aleksandrova, et al., (2021); FAO & RCRCCC (2019)]

	Prevensi	Promosi	Proteksi	Transformasi
Lingkungan Alam	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi risiko pada masyarakat; Dukungan infrastruktur; Edukasi dan Perilaku hidup bersih, sehat dan berkelanjutan; Edukasi strategi bertahan hidup dalam kondisi tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan langsung tunai dan bahan makanan pokok; Bantuan perbaikan infrastruktur jalan; Posko pemukiman darurat dan ruang isolasi; Bantuan kesehatan dan obat-obatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme deteksi dini; Kelembagaan dalam kesiapsiagaan dan peringatan dini; Mekanisme evakuasi yang teratur dan dapat diandalkan; Pembangunan infrastruktur tanggap bencana; Jaminan dalam akses kesehatan dan mata pencaharian. 	<ul style="list-style-type: none"> Migrasi/ relokasi penduduk.
Lingkungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi tentang toleransi; Edukasi anti kekerasan; Infrastruktur atau layanan pendukung keberagaman dan perdamaian; Pengendalian penduduk. 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kaum marginal; Layanan konseling untuk korban diskriminasi dan kekerasan; Responsibilitas terkait kasus kekerasan dan diskriminasi; Pemberian tunjangan anak/istri/ lansia, serta angkatan kerja yang sedang mencari kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan dan hukum yang jelas dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan; Kelembagaan untuk menangani masalah diskriminasi dan kekerasan Jaminan perlindungan sosial pada setiap korban diskriminasi dan kekerasan; Kebijakan dan hukum yang membuat pelaku diskriminasi dan kekerasan jera; Jaminan kesehatan dan penghidupan di hari tua. 	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi/Rekayasa Sosial untuk kesetaraan hak dan kewajiban; Relokasi atau memisahkan penduduk satu dengan lainnya; Migrasi/ ruralisasi.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan industri yang terintegrasi; Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi; Sosialisasi manajemen risiko dalam bekerja; Kesempatan akses yang sama terhadap pekerjaan; Kebijakan pajak untuk bahan pokok dan mewah. 	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan langsung tunai; Bantuan langsung kebutuhan pokok; Subsidi; Tunjangan untuk Angkatan kerja yang sedang mencari kerja; Program Pemberdayaan untuk masyarakat rentan. 	<ul style="list-style-type: none"> Beasiswa atau jaminan pendidikan untuk masyarakat miskin; Penerapan upah minimum; Kebijakan harga pasar untuk kebutuhan pokok; Kebijakan monopoli/penimbunan barang pokok atau komersil; Jaminan sosial yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan jaminan kematian khususnya untuk masyarakat miskin; Diversifikasi penghidupan, mata pencaharian atau bentuk investasi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi padat karya; Revolusi industri untuk redistribusi sumber penghidupan; Penerapan teknologi yang mendukung kesetaraan dalam kesempatan; Inovasi/Rekayasa Sosial untuk kesetaraan kesempatan; Urbanisasi/ ruralisasi.
Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur dan layanan Kesehatan; Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan; Pembangunan infrastruktur fisik dan administratif untuk akses Kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan tenaga kesehatan pada lokasi atau kondisi yang rentan; Pengadaan Infrastruktur Penunjang Disabilitas; Pengadaan layanan konseling. 	<ul style="list-style-type: none"> Asuransi atau jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> Migrasi/ urbanisasi.



Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi promotif dapat diwujudkan dengan: 1) Pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk mendukung kaum marginal. Sepertihalnya toilet dan jalan khusus untuk kaum difabel atau kursi untuk wanita hamil dan menyusui; 2) Optimasi layanan publik dan konseling untuk korban diskriminasi dan kekerasan. Tentunya, layanan ini harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mengalami diskriminasi atau kekerasan; 3) Respon yang cepat dari pemerintah dan masyarakat terkait kasus diskriminasi dan kekerasan yang muncul ke permukaan. Pada pengertian ini, cepat atau lambatnya respon dari pemerintah maupun organisasi masyarakat menjadi salah satu indikator dalam menilai keseriusan dalam mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan. Respon ini juga berguna untuk melindungi dan memberikan dukungan moral bagi setiap korbannya; 4) Pemberian tunjangan anak, istri dan lansia. Tunjangan ini dimaksudkan untuk meringankan beban yang harus ditanggung oleh Angkatan kerja, khususnya pada keluarga dengan rasio dependensi yang tinggi. Selain tunjangan untuk anak, istri dan lansia, tunjangan yang mungkin diperlukan adalah tunjangan bagi angkatan kerja yang belum bekerja, sedang dalam pelatihan atau sedang mencari kerja (Rotarlaura & Krsnik, 2020). Bagaimanapun juga, mereka adalah kelompok produktif, namun bisa dibilang rentan karena tidak memiliki pemasukan. Ada banyak skema pembiayaan yang mungkin dilakukan untuk menjamin kesejahteraan angkatan kerja yang belum bekerja tanpa harus membebani keuangan negara.

Sementara itu untuk aspek ekonomi, intervensi promotif dapat dilakukan dengan: 1) Memberikan bantuan langsung tunai untuk mempertahankan kemampuan konsumsi dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat (Dewi & Andrianus, 2021); 2) Dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi yang tidak dapat bertahan, bantuan kebutuhan pokok diperlukan agar masyarakat dapat bertahan hidup dalam situasi krisis; 3) Mengingat kedua intervensi tersebut tidak memungkinkan untuk diberikan dalam jangka menengah, maka kebijakan subsidi merupakan salah satu intervensi yang bisa diterapkan, khususnya pada komoditas pokok dan pendukung produktivitas seperti pupuk dan benih (Poernomo, 2017) untuk menjaga harga kebutuhan pokok dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan stabil; 4) Pemberian tunjangan kepada tenaga kerja yang memiliki anak, istri dan tanggungan lansia. Tunjangan ini juga direkomendasikan untuk angkatan kerja yang sedang mencari kerja atau berada dalam masa pelatihan; 5) Melakukan upaya aktif melalui program pemberdayaan masyarakat (Habib, Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif, 2021) yang dirumuskan dengan mempertimbangkan masalah, kebutuhan dan potensi masyarakat (Fatkhullah, Mulyani, & Imawan, 2021). Sedangkan untuk aspek kesehatan, intervensi promotif dapat berbentuk: 1) Penambahan tenaga kesehatan dan obat-obatan untuk didistribusikan ke lokasi yang lebih rentan. Banyak fasilitas kesehatan di daerah yang membutuhkan tenaga kesehatan dan obat-obatan lebih dibandingkan perkotaan dengan fasilitas kesehatan yang beragam, mulai dari fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh negara, hingga swasta; 2) Hal tersebut juga berlaku untuk layanan konseling dan rehabilitasi; 3) Pengadaan infrastruktur yang menunjang atau mendukung disabilitas.

Jika risiko tetap menjadi suatu ancaman, atau apabila ancaman yang ada berisiko untuk terjadi berulang kali, dalam hal ini tingkat risiko berada dalam kategori tinggi, maka pemangku kepentingan harus mempertimbangkan untuk melakukan intervensi protektif. Intervensi protektif adalah intervensi yang bertujuan untuk dapat melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang mungkin diderita oleh masyarakat secara terus menerus. Intervensi yang dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat dari risiko lingkungan alam adalah: 1) Mengupayakan mekanisme deteksi dini terkait bencana di sekitar masyarakat. Mekanisme ini membuat masyarakat lebih siap terhadap suatu ancaman sehingga dampak dari ancaman tersebut dapat diminimalisir (Usmanto & Utami, 2018); 2) Mengesahkan kelembagaan dalam kesiapsiagaan. Dalam kondisi krisis, dibutuhkan otoritas darurat yang berfungsi untuk mengkoordinir masyarakat dan menyiapkan evakuasi. Kelembagaan ini dapat ditunjuk oleh pemerintah, atau bahkan berasal dari inisiatif masyarakat sendiri; 3) Merancang mekanisme evakuasi yang jelas, teratur dan dapat diandalkan (Aleksandrova, et al., 2021). Mekanisme inilah yang akan jadi panduan utama bagi masyarakat untuk diberlakukan dalam kondisi krisis. Dengan adanya mekanisme yang jelas, teratur dan dapat diandalkan, masyarakat tidak akan kebingungan sehingga akan ada lebih banyak nyawa yang bisa terselamatkan; 4) Pembangunan infrastruktur tanggap kebencanaan. Salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya tanggap bencana adalah infrastruktur jalan. Akses jalan yang bagus dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan evakuasi, mendapatkan fasilitas dan layanan medis dengan cepat, serta memastikan bantuan berupa sandang, papan, pangan, serta obat-obatan dapat disalurkan tepat pada waktunya; 5) Jaminan dalam hal akses kesehatan dan mata pencaharian. Dalam kondisi krisis, korban luka-luka atau bahkan penyakit menular mungkin akan menjangkiti para pengungsi. Untuk meminimalisir korban, diperlukan jaminan dalam akses kesehatan bagi setiap individu terdampak. Selain kesehatan, aspek yang juga harus diperhatikan adalah penghidupan atau mata pencaharian. Dalam kondisi krisis, beberapa mata pencaharian masyarakat mungkin akan terdampak atau bahkan sepenuhnya hilang.

Dalam aspek lingkungan sosial, intervensi protektif dapat diwujudkan dengan: 1) Mengupayakan kebijakan dan hukum yang jelas dalam mengatasi diskriminasi dan kekerasan (Arief, 2018). Adapun hukum yang dimaksudkan mencakup pemenuhan hak, ganti rugi, dan pemulihan bagi korban diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, hukum ini juga harus memberikan efek yang jera bagi setiap pelaku diskriminasi dan kekerasan agar kejadian yang sama tidak terulang di lain kesempatan; 2) Mengesahkan kelembagaan dan bantuan hukum untuk menangani masalah diskriminasi dan kekerasan yang berpihak pada korban dan masyarakat miskin (Ramdan, 2019). Bagaimanapun juga, hukum tidak dapat bergerak sendiri. Setiap pelanggaran dan praktik diskriminasi dan kekerasan pada masyarakat membutuhkan agen yang turut aktif dalam melaporkan, mendampingi, serta memastikan setiap pelanggarnya telah mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya; 3) Adanya perlindungan sosial bagi setiap korban



diskriminasi dan kekerasan (Rusyidi, Nuriyah, & Meilani, 2017). Perlindungan ini akan membuat para korban merasa aman dan percaya diri dalam melaporkan diskriminasi dan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib; 4) Adanya jaminan kesehatan dan penghidupan di hari tua. Selain memastikan kesejahteraan lansia, jaminan kesehatan dan penghidupan hari tua juga melepaskan beban ketergantungan pada angkatan kerja, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan konflik antar-generasi.

Sementara itu untuk aspek ekonomi, intervensi protektif dapat dilakukan dengan: 1) Memberikan pemerataan akses terhadap pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa (Perna, Orosz, & Jumakulov, 2018), khususnya pada masyarakat miskin; 2) Penerapan upah minimum untuk melindungi masyarakat miskin dari praktik eksploitasi (Cengiz, Dube, Lindner, & Zipperer, 2019). Kebijakan ini juga dinilai dapat meningkatkan arus kas masyarakat dan mendorong investasi; 3) Penerapan kebijakan pembatasan harga pasar untuk kebutuhan-kebutuhan pokok. Penerapan harga maksimum pada kebutuhan pokok bertujuan untuk meminimalisir penimbunan, serta agar masyarakat miskin tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya; 3) Menerapkan kebijakan monopoli dan penimbunan, serta menindak tegas oknum-oknum yang terbukti melakukan praktik penimbunan baik untuk barang pokok maupun komersil; 4) Mengupayakan jaminan sosial yang mencakup kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan jaminan kematian khususnya pada masyarakat miskin. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat jika suatu saat nanti mereka berada dalam kondisi krisis. Misalnya saja sakit, kecelakaan, maupun meninggal dan menyisakan tanggungan yang belum siap untuk bekerja; 5) Mendorong masyarakat untuk mengupayakan diversifikasi sumber penghidupan sedini mungkin. Sumber penghidupan lain yang dimaksud adalah pekerjaan sampingan, tabungan, maupun investasi dari berbagai instrumen investasi. Diversifikasi sumber penghidupan bertujuan sebagai sabuk pengaman ketika terjadi krisis dan ketika seorang individu harus kehilangan profesi atau pendapatan utamanya. Sedangkan untuk aspek kesehatan, intervensi promotif dapat berbentuk program asuransi atau jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Asuransi atau jaminan ini penting agar masyarakat dapat fokus untuk memulihkan kondisinya dari berbagai penyakit yang diderita tanpa harus terbebani dengan masalah lainnya.

Apabila berbagai upaya telah dilakukan namun kurang efektif baik untuk menurunkan tingkat risiko, mendukung maupun melindungi masyarakat, maka diperlukan intervensi yang bersifat transformatif. Intervensi transformatif merupakan intervensi yang bertujuan untuk merubah sebagian atau bahkan keseluruhan aspek dalam suatu masyarakat, sehingga mereka terhindar dari risiko yang mengancam. Intervensi ini juga dapat digunakan apabila risiko yang ada berada dalam kategori sangat tinggi, atau berpotensi memakan banyak korban dan menimbulkan banyak kerugian. Intervensi yang bersifat transformatif dapat diterapkan dengan cara mengubah cara hidup, mata pencaharian, hingga cara masyarakat memandang suatu permasalahan melalui rangkaian program atau kegiatan. Dalam sektor ekonomi, intervensi ini dilakukan dengan mendorong migrasi masyarakat pedesaan ke perkotaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga (Habib, Anggraeni, & Nisa, 2021). Upaya ini membutuhkan waktu dan proses yang relatif panjang. Sehingga dalam kondisi mendesak, apabila risiko dimungkinkan datang dalam waktu dekat, maka evakuasi atau bahkan migrasi menjadi satu-satunya intervensi yang bisa diupayakan untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman.

Dalam kondisi apa pun, intervensi yang dilakukan menuntut partisipasi dari masyarakat. Pada pengertian ini, adalah penting untuk menempatkan masyarakat sebagai agen penggerak atau bahkan pelaku utama dalam melakukan intervensi. Sehingga, intervensi yang dimaksudkan tidak dimaknai dengan perubahan yang berasal dari pihak eksternal, melainkan dimaknai sebagai suatu inisiatif yang berasal dari dalam. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki kesadaran bahwa perubahan yang ada merupakan upaya mereka sendiri dan dengan sepenuh hati akan berupaya untuk menjamin keberhasilan dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Selain masyarakat, ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk melakukan intervensi. Mulai dari pemerintah sebagai penanggung jawab utama, pihak swasta dalam sudut pandang bisnisnya, hingga lembaga kemanusiaan atau NGO (*non-government organization*) dengan berbagai kepentingannya. Perlu adanya kerjasama lintas sektoral agar intervensi dapat dilakukan sebagai tujuan-tujuannya dapat terpenuhi. Hal terpenting dalam menjalin kerjasama lintas sektoral adalah menyamakan visi, sehingga program ataupun kegiatan yang dirancang bersama dapat dilakukan dengan pembagian tugas, kewajiban, wewenang yang jelas. Termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan sebagian atau bahkan seluruh kredit atas keberhasilan dalam mengupayakan intervensi pada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kerentanan merupakan kondisi suatu masyarakat yang membuat mereka mudah terdampak oleh berbagai ancaman. Dari aspek ekonomi mikro kekacauan tersebut dapat berupa kemiskinan, sedangkan dari aspek ekonomi makro kekacauan tersebut dapat diartikan sebagai jatuhnya pertumbuhan ekonomi. Ancaman tersebut mungkin terjadi karena adanya risiko yang bersumber dari faktor eksternal seperti lingkungan alam, sosial dan komposisi demografi maupun internal seperti kondisi ekonomi, kesehatan fisik dan mental. Baik faktor eksternal maupun internal memiliki keterkaitan yang erat, sehingga upaya yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi atau meminimalisir kerentanan masyarakat. Mengetahui bahwasanya kerentanan memiliki dimensi yang kompleks, dan setiap masyarakat memiliki kerentanan yang berbeda, maka dalam hal ini kerentanan akan selalu ada dan tidak bisa dieliminasi sepenuhnya dari kehidupan masyarakat. Namun, kerentanan dapat dimiminalisir melalui pendekatan kebijakan sosial yang diterapkan



secara berbeda pada masyarakat dengan asumsi bahwa dimensi, bentuk dan penyebab kerentanan tersebut juga berbeda. Untuk itu, identifikasi, dan kategorisasi tingkat kerentanan pada masyarakat penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk menyusun intervensi. Identifikasi dilakukan untuk memetakan dan melakukan kategorisasi tidak hanya berdasarkan penyebab dan bentuk kerentanan, namun juga pada prevalensi tingkat keparahan atau urgensi dari kerentanan yang ada pada masyarakat. Berbagai macam intervensi dapat diterapkan mulai dari bantuan nyata, program kerja, hingga pada tingkat kebijakan. Jika ancaman belum benar-benar terjadi, atau indeks risiko berada dalam kategori rendah, intervensi yang bersifat preventif digunakan untuk mencegah atau menghindarkan masyarakat dari kondisi krisis. Jika bencana tidak lagi terhindarkan, atau dalam konteks ini indeks risiko berada dalam kategori sedang, diperlukan intervensi yang bersifat promotive untuk mendukung daya tahan masyarakat dalam menghadapi kondisi krisis. Sementara itu, jika ancaman mungkin akan terjadi berulang kali, atau dalam hal ini indeks risiko berada dalam kategori tinggi, maka intervensi yang bersifat protektif diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang ada di masa depan. Apabila berbagai upaya telah dilakukan namun kurang efektif baik untuk mencegah bencana, mendukung maupun melindungi masyarakat, maka diperlukan intervensi yang bersifat transformatif. Pada kasus tertentu, apabila indeks risiko berada dalam kategori sangat tinggi, upaya ini dapat berupa migrasi permanen dengan tujuan untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan masyarakat. Karena penelitian ini didasarkan atas beberapa kata kunci seperti: *vulnerability*, *social risk*, dan *social protection*, serta dilakukan pada kajian yang diterbitkan dalam delapan tahun terakhir, penelitian ini mungkin kurang bisa menjelaskan konsep-konsep terkini yang sedang dikembangkan dalam upaya untuk membangun dan mengatasi kerentanan pada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga kurang relevan untuk digunakan sebagai referensi dalam merancang strategi intervensi pada fenomena terbaru yang karakteristiknya belum ada atau tidak termasuk dalam variabel literatur review. Kendati demikian, hasil dari penelitian ini dapat mendorong temuan dan diskusi baru untuk melengkapi kerangka konseptual dengan tujuan untuk membuka gerbang pada berbagai skenario yang mungkin dirancang agar umat manusia dapat bertahan dari berbagai kondisi tak terduga di masa mendatang.

REFERENCES

- Aleksandrova, M., Kaltborn, M., Malerba, D., Mucke, P., Neuschäfer, O., Radtke, K., . . . Wiebe, N. (2021). *World Risk Report 2021: Social Protection*. Bochum, Germany: Bündnis Entwicklung Hilft. Diambil kembali dari https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2021/09/WorldRiskReport_2021_Online.pdf
- Arief, H. (2018). Women and Domestic Violence: Legal Protection Perspective. *PAGARUYUANG Law Journal*, 2(1), 64-79.
- Aromataris, E., & Pearson, A. (2014). The Systematic Review: An Overview. *American Journal of Nursing*, 114(3), 53-58. doi:10.1097/01.NAJ.0000444496.24228.2c
- Asiyah, A., Kurniawan, D., & Topano, A. (2021). Peran Pendidikan Dalam Menjaga Toleransi Antar Umat Beragama Di Kabupaten Kaur. *Jurnal Edukasia Multikultura*, 3(1), 1-20. doi:http://dx.doi.org/10.29300/jem.v3i1.4683
- Bidisha, S. H., Abdullah, S. M., Siddiqua, S., & Islam, M. M. (2019). How Does Dependency Ratio Affect Economic Growth In the Long Run? Evidence from Selected Asian Countries. *The Journal of Developing Areas*, 54(2), 47-60. doi:http://dx.doi.org/10.1353/jda.2020.0015
- Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The Effect of Minimum Wages on Low-Wage Jobs. *The Quarterly Journal of Economics*, 134(3), 1405-1454. doi:https://doi.org/10.1093/qje/qjz014
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2), 77-84.
- FAO and Red Cross Red Crescent Climate Centre. (2019). *Managing climate risks through social protection – Reducing rural poverty and building resilient agricultural livelihoods*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fatkullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi Pengembangan Masyarakat Petani Lahan Gambut melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Analisis Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 15-29. doi:https://doi.org/10.22146/jsds.2186
- Fields, G. S. (2014). Self-employment and Poverty In Developing Countries. *IZA World of Labor*, 60, 1-10.
- Global Humanitarian Assistance. (2016). *PEOPLE: Poverty, Risk and Crisis*. Bristol, England: Development Initiative.
- Habib, M. A. (2021). Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1(2), 106-134.
- Habib, M. A., Anggraeni, U., & Nisa, K. K. (2021). Utilization Of Migrant Workers'revenues (Remittance) For The Family Economy. *Journal of Urban Sociology*, 4(1), 16-30. Diambil kembali dari <http://www.journal.uwks.ac.id/index.php/sosiologi>
- Juhad, H. M. (2021). Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selong Lombok Timur. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(2), 1-7. doi:https://doi.org/10.51878/cendekia.v1i2.106
- Mou, J. (2020). Research on the Impact of COVID19 on Global Economy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 546. doi:https://doi.org/10.1088/1755-1315/546/3/032043
- Nisa, K. K., & Habib, M. A. (2020). Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di TBBM Pertamina Rewulu sebagai Bentuk Pemberdayaan Masyarakat. *Journal SOSIOLOGI*, 3(2), 65-72.
- Olivola, C., & Sussman, A. B. (2015). Taxes and Consumer Behavior. Dalam M. I. Norton, D. D. Rucker, & C. Lambertson, *The Cambridge Handbook of Consumer Psychology* (hal. 564-588). Cambridge: Cambridge University Press. doi:http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781107706552.021
- Perna, L. W., Orosz, K., & Jumakulov, Z. (2018). Understanding the human capital benefits of a government-funded international scholarship program: An exploration of Kazakhstan's Bolashak program. *International Journal of Educational Development*, 40, 86-97. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.12.003



- Poernomo, A. (2017). Analysis of the Protection of Input Subsidies Policy (Fertilizer and Seed) and Production Output in Rice Plant Agriculture in Indonesia. *EKO-REGIONAL*, 12(1), 49-55. doi:<https://doi.org/10.20884/1.erjpe.2017.12.1.1069>
- Ramdan, A. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 233-255.
- Ridwan. (2015). Problematika Keragaman Kebudayaan dan Alternatif Pemecahan. *Jurnal Madaniyah*, 2(9), 254-270.
- Ritchie, H., & Roser, M. (2019). *Natural Disasters*. Diambil kembali dari Our World in Data: <https://ourworldindata.org/natural-disasters>
- Riyanto, E. A. (2015). Mapping Social and Economic Vulnerability in Forest and Peatland Fire Disaster in Bengkalis Regency, Riau Province. *Forum Geografi*, 29(1), 41-48.
- Rotarlaura, L. J., & Krsnik, S. (2020). Analysing the relationship between unemployment benefits and unemployment duration. *Society and Economy*, 42(3), 280-297. doi:<http://dx.doi.org/10.1556/204.2020.00009>
- Rusyidi, B., Nuriyah, E., & Meilani, L. (2017). Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pencegahan Retrafficking Bagi Anak Di Provinsi Jawa Barat. *PROSIDING KS: Riset & PKM*, 4(1), 140-154. doi:<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14223>
- Shiwaku, K., Sakurai, A., & Shaw, R. (2016). *Disaster Resilience of Education Systems: Experiences from Japan*. Japan: Springer.
- Sumampouw, N. S. (2019). Menggemakan Perjumpaan; Memanfaatkan Ruang Publik Sebagai Arena Sosialisasi Wacana Kerukunan. *MIMIKRI*, 5(2), 207-215. Diambil kembali dari <https://blamakassar.e-journal.id/mimikri/article/view/290>
- Syafitri, Y., Bahtiar, & Didik, L. A. (2018). Analisis Pergeseran Lempeng Bumi yang Meningkatkan Potensi Terjadinya Gempa Bumi di Pulau Lombok. *KONSTAN: Jurnal Fisika dan Pendidikan Fisika*, 3(2), 139-146. doi:<https://doi.org/10.20414/konstan.v4i2.43>
- Usmanto, B., & Utami, . H. (2018). Prototype Sistem Pendeteksi Dan Peringatan Dini Bencana Alam Di Indonesia Berbasis Internet Of Things (IoT). *Explore – Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 9(2), 127-136. doi:<http://dx.doi.org/10.36448/jsit.v9i2.1085>
- Yandrizal, Y., & Suryani, D. (2015). Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), 107-114. doi:<https://doi.org/10.25077/jka.v4i1.208>
- Zorn, M. (2018). Natural Disasters and Less Developed Countries. In: Pelc S., Koderman M. (eds) Nature, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization. *Perspectives on Geographical Marginality*, 3, 59-78. doi:http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-59002-8_4